

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN WISATA SAMALENGOH DI DESA GUNTURMEKAR KECAMATAN TANJUNGKERTA KABUPATEN SUMEDANG

Yuyun Sopiani Nurjanah

Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received April 12, 2026

Revised Mei 20, 2026

Accepted Juni 16, 2026

Keywords:

Village government

Village tourism

Ecotourism

Samalengoh

Community empowerment

ABSTRACT

The development of village tourism has become a crucial strategy in improving the welfare of local communities. This study aims to analyze the role of the Gunturmekar Village Government in the development of Samalengoh tourism, located in Tanjungkerta Subdistrict, Sumedang Regency. This research employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The focus of the study includes the facilitative, educative, representational, and technical roles carried out by the village government. The findings indicate that the Gunturmekar Village Government plays a significant role in providing basic infrastructure, establishing and mentoring the Tourism Awareness Group (Pokdarwis), and conducting training for the community in tourism management. The government also contributes to tourism promotion and establishes external collaborations with various stakeholders. Challenges identified include budget limitations, suboptimal community participation, and difficulties in attracting investors. In conclusion, the village government's role in each of these dimensions greatly influences the success of Samalengoh tourism development. The implication of this research highlights the need to strengthen collaboration among the village government, local communities, and external partners. It recommends strategies to enhance community capacity and participation, as well as optimize budgetary support to ensure the sustainability of village tourism development.



Copyright © 2026 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Yuyun Sopiani Nurjanah

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas April

Jln. Angkrek Situ No. 19 Kelurahan Situ - Sumedang

Email: yuyunsopiani337@gmail.com

1. INTRODUCTION

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkenalkan potensi budaya dan lingkungan suatu daerah. Pengembangan pariwisata tidak hanya dilakukan pada kawasan perkotaan atau destinasi berskala besar, tetapi juga dapat dikembangkan melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki desa. Desa memiliki kekayaan alam, budaya, tradisi, produk lokal, dan kehidupan sosial yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata.

Pariwisata desa merupakan salah satu pendekatan strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengembangan wisata desa memberi kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat sebagai pengelola, penyedia jasa, pelaku usaha, pemandu wisata, produsen kerajinan, serta penyedia produk makanan dan minuman. Dengan demikian, kegiatan pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas dan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal.

Febriandhika dan Kurniawan (2019) menjelaskan bahwa konsep *community-based tourism* menempatkan masyarakat sebagai pusat dalam pembangunan pariwisata dengan menekankan pemanfaatan potensi lokal dan peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam pendekatan tersebut, masyarakat bukan hanya menjadi objek yang menerima dampak kegiatan pariwisata, tetapi juga menjadi pelaku yang terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan penerimaan manfaat.

Penerapan pariwisata berbasis masyarakat penting karena keberlanjutan destinasi sangat dipengaruhi oleh dukungan masyarakat lokal. Masyarakat merupakan pihak yang berinteraksi secara langsung dengan lingkungan destinasi dan wisatawan. Oleh karena itu, pengetahuan, sikap, partisipasi, dan rasa memiliki masyarakat menentukan kemampuan destinasi dalam mempertahankan kualitas lingkungan dan pelayanan.

Pengembangan wisata desa juga dapat menjadi instrumen pemberdayaan. Masyarakat dapat memperoleh keterampilan baru dalam pengelolaan destinasi, pelayanan wisatawan, pemasaran digital, pengelolaan usaha, kebersihan, keamanan, dan pelestarian lingkungan. Pemberdayaan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat meningkatkan kemandirian masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan pengelolaan terhadap pemerintah atau pihak luar.

Selain masyarakat, pemerintah desa memiliki kedudukan strategis dalam pengembangan pariwisata. Pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan potensi serta kebutuhan lokal. Kedekatan pemerintah desa dengan masyarakat membuat pemerintah desa lebih memahami kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan wilayahnya. Kedudukan tersebut memungkinkan pemerintah desa menjadi penggerak, fasilitator, penghubung, dan pengawas dalam pengembangan destinasi wisata.

Amirudin (2018) menunjukkan bahwa penguatan peran pemerintah desa dalam kebijakan pariwisata dapat mendorong pengembangan destinasi berbasis masyarakat. Kerja sama antara perangkat desa dan kelompok sadar wisata dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat serta memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak cukup hanya memberikan izin atau dukungan administratif, tetapi perlu terlibat dalam membangun kelembagaan dan menggerakkan partisipasi masyarakat.

Peran pemerintah desa dapat diwujudkan melalui penyusunan kebijakan, perencanaan program, pengalokasian anggaran, pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas masyarakat, promosi, pembentukan kelembagaan pengelola, dan pengembangan kemitraan. Pemerintah desa juga perlu memastikan agar pembangunan pariwisata tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik kepentingan, ketimpangan manfaat, atau berkurangnya akses masyarakat terhadap sumber daya lokal.

Pengembangan destinasi wisata membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Pemerintah desa umumnya memiliki keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, jaringan promosi, dan kemampuan teknis. Oleh karena itu, kemitraan dengan pemerintah kabupaten, dinas terkait, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media diperlukan untuk memperkuat pengelolaan destinasi.

Rahmat (2020) menjelaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha menjadi kunci dalam menciptakan kreativitas dan inovasi agar produk wisata memiliki daya saing. Kolaborasi memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan, pembagian sumber daya, penguatan promosi, dan pengembangan produk wisata. Dalam konteks wisata desa, pemerintah desa dapat berperan sebagai pihak yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan tersebut.

Pembangunan destinasi juga perlu memperhatikan atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan pelayanan pendukung. Atraksi berkaitan dengan daya tarik yang dapat dinikmati wisatawan. Aksesibilitas mencakup kemudahan mencapai lokasi, kondisi jalan, petunjuk arah, dan transportasi. Amenitas meliputi fasilitas seperti toilet, tempat ibadah, tempat makan, area parkir, dan tempat menginap. Sementara itu, pelayanan pendukung mencakup kelembagaan, informasi, promosi, keamanan, kebersihan, dan pelayanan kepada wisatawan.

Apabila salah satu komponen tersebut tidak tersedia secara memadai, pengalaman wisatawan dan keberlanjutan destinasi dapat terganggu. Daya tarik alam yang baik, misalnya, belum tentu berkembang menjadi destinasi yang berdaya saing apabila akses jalan sulit, fasilitas terbatas, promosi lemah, atau pengelolaan belum profesional. Karena itu, pengembangan wisata membutuhkan perencanaan yang terpadu dan tidak dapat hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan.

Salah satu desa yang memiliki potensi pengembangan wisata alam adalah Desa Gunturmekar di Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang. Desa tersebut memiliki destinasi wisata Samalengoh Camp yang terletak di kawasan perbukitan Gunung Gajah. Samalengoh Camp menawarkan pemandangan alam dari ketinggian sekitar 804 meter di atas permukaan laut. Dari lokasi tersebut, wisatawan dapat menikmati pemandangan Kota Sumedang pada malam hari serta matahari terbit dengan latar Gunung Ciremai.

Berdasarkan profil Desa Wisata Samalengoh Camp pada Jejaring Desa Wisata Kementerian Pariwisata, destinasi tersebut dilengkapi dengan kamar mandi umum, musala, kafetaria, area swafoto, balai pertemuan, jalur penjelajahan alam, area parkir, *camping ground*, dan *glamping*. Desa Gunturmekar juga memiliki potensi lain berupa Kebun Pinus, kesenian karinding, calung dan kuda singa, produksi gula merah dan tempe, serta komoditas hortikultura (Kementerian Pariwisata, 2025).

Keragaman tersebut menunjukkan bahwa potensi pariwisata Desa Gunturmekar tidak terbatas pada pemandangan Samalengoh Camp. Destinasi tersebut dapat dikembangkan melalui integrasi antara wisata alam, budaya, kuliner, pertanian, dan produk ekonomi kreatif. Pengembangan paket wisata yang menghubungkan berbagai potensi dapat memperpanjang waktu tinggal wisatawan dan memperluas penerimaan ekonomi masyarakat.

Samalengoh Camp mulai dibuka pada 2019 dan selanjutnya berkembang sebagai salah satu destinasi wisata alam di Kabupaten Sumedang. Keberadaannya memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha makanan dan minuman, jasa pemandu, penyewaan perlengkapan berkemah, produk kerajinan, dan kegiatan ekonomi lainnya. Destinasi ini juga dapat menjadi media untuk memperkenalkan identitas budaya serta produk unggulan Desa Gunturmekar.

Namun, potensi alam tidak dengan sendirinya menjamin keberhasilan pengembangan destinasi. Pengelolaan memerlukan kelembagaan yang jelas, pembagian tanggung jawab, sumber pembiayaan, sumber daya manusia, strategi pemasaran, pemeliharaan fasilitas, dan partisipasi masyarakat. Tanpa pengelolaan yang konsisten, fasilitas dapat mengalami kerusakan, kualitas pelayanan menurun, dan manfaat ekonomi tidak terdistribusi secara merata.

Wulandari dan Sari (2022) menemukan bahwa partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam implementasi kebijakan desa wisata. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Setigi memberikan dampak sosial dan ekonomi. Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa partisipasi yang dibentuk melalui pendekatan dari atas dapat menyebabkan masyarakat lebih banyak berperan sebagai pelaksana daripada sebagai pengambil keputusan. Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya pemerintah desa membuka ruang partisipasi sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Samalengoh Camp perlu diwujudkan melalui musyawarah, pengelolaan bersama, pelatihan, kegiatan kebersihan, promosi, penyediaan usaha wisata, dan pengawasan lingkungan. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam menentukan arah pengembangan agar program yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas lokal.

Rendahnya partisipasi masyarakat dapat disebabkan oleh belum meratanya pemahaman mengenai manfaat pariwisata, ketidakjelasan pembagian keuntungan, kurangnya kepercayaan terhadap pengelola, keterbatasan keterampilan, atau minimnya ruang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah desa perlu mengidentifikasi penyebab tersebut agar strategi pemberdayaan tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi benar-benar meningkatkan kemampuan dan keterlibatan masyarakat.

Pengembangan pariwisata juga membutuhkan sumber pembiayaan. Anggaran desa dapat digunakan sesuai dengan ketentuan dan prioritas pembangunan, tetapi kemampuan anggaran pemerintah desa relatif terbatas. Pemerintah desa perlu mengembangkan kemitraan yang tidak hanya berorientasi pada investasi finansial, tetapi juga dukungan peralatan, pelatihan, promosi, teknologi, dan pengembangan produk.

Kerja sama dengan investor perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak mengurangi penguasaan masyarakat terhadap destinasi. Pemerintah desa harus memastikan adanya kejelasan hak dan kewajiban, perlindungan lingkungan, penyerapan tenaga kerja lokal, pembagian manfaat, dan keberlanjutan investasi. Kemitraan yang tidak disertai tata kelola yang baik berpotensi menimbulkan ketimpangan dan konflik.

Selain permasalahan anggaran dan investasi, promosi menjadi unsur penting dalam meningkatkan pengenalan destinasi. Promosi melalui media sosial, situs pariwisata, kegiatan pemerintah daerah, komunitas wisata, dan kerja sama dengan pelaku perjalanan dapat memperluas jangkauan informasi. Namun, promosi harus diikuti kesiapan destinasi dalam menerima wisatawan. Peningkatan kunjungan tanpa kesiapan fasilitas dan pengelolaan dapat memperbesar tekanan terhadap lingkungan.

Kelestarian lingkungan menjadi aspek penting karena daya tarik utama Samalengoh Camp berasal dari kondisi alamnya. Pengembangan fasilitas harus mempertimbangkan daya dukung kawasan, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, sanitasi, keselamatan, pencegahan kebakaran, dan perlindungan vegetasi. Pemerintah desa bersama pengelola perlu menetapkan aturan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian alam.

Dalam konteks tersebut, peran Pemerintah Desa Gunturmekar dapat dianalisis melalui peran fasilitatif, edukatif, representasional, dan teknis. Peran fasilitatif berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa menciptakan kondisi yang mendukung, menyediakan sarana dasar, menggerakkan masyarakat, dan membantu penyelesaian masalah. Peran edukatif mencakup sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pariwisata.

Peran representasional berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa mewakili kepentingan masyarakat dan membangun hubungan dengan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, media, serta pihak eksternal lainnya. Sementara itu, peran teknis berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pengelolaan data, promosi, pemeliharaan fasilitas, pengawasan, keamanan, dan evaluasi kegiatan wisata.

Keempat peran tersebut saling berkaitan. Penyediaan fasilitas tanpa peningkatan kapasitas masyarakat dapat menciptakan ketergantungan terhadap pemerintah. Pelatihan tanpa dukungan pembiayaan dan akses pasar juga sulit menghasilkan usaha yang berkelanjutan. Demikian pula, kemitraan dengan pihak luar tanpa kemampuan teknis dan kelembagaan yang kuat dapat mengurangi posisi tawar pemerintah desa serta masyarakat.

Berdasarkan identifikasi awal, pengembangan wisata Samalengoh masih menghadapi keterbatasan anggaran, belum optimalnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya dukungan investor. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi destinasi dan kapasitas pengelolaannya. Pemerintah desa dituntut menjalankan peran yang lebih aktif agar pengembangan tidak hanya bertumpu pada potensi alam.

Penelitian terdahulu telah banyak membahas desa wisata, pariwisata berbasis masyarakat, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi pemangku kepentingan. Namun, setiap desa memiliki kondisi kelembagaan, sumber daya, pola kepemimpinan, tingkat partisipasi, dan karakteristik destinasi yang berbeda. Oleh karena itu, hasil penelitian di daerah lain belum tentu sepenuhnya menggambarkan peran Pemerintah Desa Gunturmekar dalam pengembangan Samalengoh Camp.

Kajian mengenai Samalengoh Camp penting dilakukan karena destinasi ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai penggerak ekonomi desa sekaligus sarana pelestarian lingkungan dan budaya lokal. Penelitian diperlukan untuk mengetahui bentuk peran yang telah dilaksanakan pemerintah desa, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang diperlukan untuk memperkuat pengembangan destinasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Desa Gunturmekar dalam pengembangan wisata Samalengoh Camp melalui dimensi fasilitatif, edukatif, representasional, dan teknis. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam merumuskan strategi pengembangan pariwisata desa yang partisipatif, berdaya saing, memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

2. METHOD

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, mengingat penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah dalam arti apa adanya, maka metode penelitian kualitatif dipandang yang lebih tepat untuk digunakan agar diperoleh data yang lengkap melalui proses wawancara secara mendalam, observasi, serta kebenaran dan keberadaan dokumen pendukung dari pernyataan para informan (Setiawan, 2018). Metode penelitian kualitatif sering disebut juga sebagai metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*). Hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.

Informan penelitian yang terdiri dari Kepala Desa Gunturmekar, Ketua BPD Gunturmekar, Pengelola Objek Wisata Samalengoh Camp, dan Perkawilan tokoh masyarakat Desa Gunturmekar.

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dilakukan melalui, Studi kepustakaan dan Studi lapangan (observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi). Lalu teknik keabsahan data menggunakan Uji *credibility* (validitas interval), Uji *transferability* (validitas eksternal), Uji *dependability* (reliabilitas), Uji *confirmability* (objektivitas). Untuk mengelola data hasil wawancara dan observasi, peneliti melakukan pengolahan data yang ditempuh sebagai berikut, Data *Collection* (Pengumpulan Data), Reduksi (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*).

Alat Ukur dalam penelitian ini menggunakan teori dari Ife dan Tesoriero (dalam Putri dan zulkarnaini, 2023: 280-282) tentang Peran Pemerintah Daerah yang menyebutkan empat dimensi yaitu: peran fasilitatif (fasilitas jalan, penerangan dan sanitasi, fasilitas pembentukan pokdarwis), peran edukasi (pelatihan wisata,

pemahaman potensi, sosialisasi ekowisata), peran representasional (promosi wisata, hubungan eksternal) dan peran teknis (peran Kamtibmas, peran moderasi, peran anggaran).

3. RESULTS AND DISCUSSION

Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Wisata Samalengoh di Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang

Peran pemerintah desa sangat penting dalam pengembangan potensi wisata lokal sebagai bagian dari strategi pembangunan desa berbasis sumber daya alam dan budaya. Pemerintah Desa Gunturmekar mengambil bagian aktif dalam pengelolaan dan pengembangan wisata Samalengoh *Camp* melalui fungsi-fungsi utama seperti perencanaan, fasilitasi, edukasi, pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat. Pengembangan wisata ini bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja di lingkungan desa.

Menurut Ife dan Tesoriero (dalam Putri dan Zulkarnaini, 2023:280), pemerintah desa dalam pembangunan partisipatif berperan sebagai fasilitator dan mediator, yang bertugas menjembatani kepentingan antar pihak serta menggerakkan potensi lokal agar berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan praktik yang dilakukan di Samalengoh, di mana pemerintah desa membentuk dan mengesahkan Pokdarwis sebagai lembaga yang menangani langsung kegiatan wisata, memberikan pelatihan pengelolaan wisata kepada masyarakat, serta melibatkan warga dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan wisata.

Selain itu, pemdes juga berperan dalam penyediaan infrastruktur dasar seperti akses jalan, penerangan, dan fasilitas sanitasi. Meski keterbatasan anggaran menjadi kendala, pemerintah desa tetap mengalokasikan dana melalui APBDes serta menjalin koordinasi dengan pihak luar seperti Dinas Pariwisata, SKPD Kabupaten Sumedang, dan Muspika setempat. Menurut Sunaryo (2018:151), keberhasilan pembangunan destinasi wisata lokal tidak hanya ditentukan oleh potensi alamnya, tetapi juga oleh sejauh mana pemerintah desa mampu membangun kelembagaan, hubungan eksternal, dan partisipasi masyarakat secara aktif.

Astuti (2020) dari Universitas Negeri Yogyakarta yang menyebutkan bahwa pemerintah desa di daerah wisata di Kabupaten Kulon Progo berperan penting dalam menggerakkan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan usaha wisata berbasis komunitas. Pendekatan ini mampu meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengelola destinasi secara berkelanjutan.

Selain itu, penelitian oleh Rachmawati (2021) dari Universitas Brawijaya tentang pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul di Malang menunjukkan bahwa peran aktif pemerintah desa dalam menginisiasi kelembagaan wisata, menggandeng pihak swasta, dan menjamin keberlanjutan infrastruktur sangat menentukan keberhasilan sebuah desa wisata. Keberhasilan di Pujon Kidul memperlihatkan bagaimana sinergi antara regulasi, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan aset desa menghasilkan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan.

Dalam konteks Samalengoh *Camp*, pemerintah desa juga menunjukkan peran representatif yang kuat. Pemerintah desa terlibat aktif dalam promosi wisata melalui media sosial, penyebaran informasi oleh aparat desa, dan partisipasi dalam kegiatan tingkat kecamatan dan kabupaten. Meskipun belum semua kegiatan promosi dilakukan secara digital akibat keterbatasan SDM dan anggaran, sinergi dengan pengelola wisata memungkinkan promosi berjalan melalui berbagai saluran tidak langsung. Beberapa pengelola bahkan membentuk tim kreatif khusus yang bertugas membuat konten promosi untuk media sosial seperti TikTok dan Instagram.

Pemerintah Desa Gunturmekar juga aktif menjalin hubungan eksternal dengan berbagai pihak, termasuk dinas pariwisata, desa tetangga, dan lembaga keamanan seperti Polsek dan Koramil. Koordinasi dilakukan untuk menjaga keamanan, membangun kemitraan kegiatan, dan mendukung promosi lintas wilayah. Namun, dari hasil penelitian ditemukan bahwa belum semua kerja sama ini ditindaklanjuti secara optimal karena adanya kendala administratif dan keterbatasan jaringan komunikasi. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas diplomasi dan representasi desa dalam forum lintas sektoral.

Dalam aspek teknis, pemerintah desa menjalankan perannya secara langsung dalam pelaksanaan program, pengelolaan anggaran, dan penanganan isu-isu sosial. Salah satu contoh konkret adalah pelaksanaan sistem piket keamanan di kawasan Samalengoh yang melibatkan Linmas, Babinsa, dan masyarakat secara bergilir. Kegiatan ini menciptakan rasa aman bagi pengunjung dan menjadi indikator stabilitas sosial kawasan wisata. Penanganan konflik antara pengelola dan Bumdes juga menjadi perhatian Pemdes melalui pendekatan mediasi kekeluargaan.

Peran anggaran menjadi salah satu peran teknis paling vital dalam pengembangan wisata. Pemerintah desa mengalokasikan dana melalui APBDes dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Bumdes. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal transparansi dan keterlibatan pengelola dalam pengawasan penggunaan

dana. Kegiatan sosialisasi keuangan dan papan informasi penggunaan dana belum dilakukan secara maksimal, sehingga muncul dugaan dan persepsi negatif dari masyarakat.

Penelitian terdahulu oleh Syafrizal (2020) dari Universitas Andalas menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran desa, terutama dalam pengembangan wisata. Tanpa mekanisme pelaporan yang jelas, partisipasi masyarakat akan menurun karena rasa tidak percaya terhadap pengelola anggaran.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Desa Gunturmekar telah menjalankan sebagian besar peran yang diperlukan dalam membangun kawasan wisata Samalengoh *Camp*. Meskipun masih terdapat hambatan seperti keterbatasan dana, rendahnya literasi teknologi, dan kurangnya tenaga ahli, komitmen pemerintah desa dalam menyusun strategi pembangunan wisata yang berkelanjutan sudah cukup kuat.

Untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata lokal, peneliti merujuk kepada dimensi dimensi menurut Ife dan Tesoriero (Putri dan Zulkarnaini, 2023: 280-282) peran pemerintah desa dapat dilihat dari 4 aspek yaitu :

1. Peran Fasilitatif
2. Peran Edukasi
3. Peran Representasional
4. Peran Teknis

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan hasil keseluruhan Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Wisata Samalengoh di Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjuungkerta Kabupaten Sumedang sebagai berikut :

Tabel 1. Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Wisata Samalengoh di Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjuungkerta Kabupaten Sumedang

No.	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
1.	Peran Fasilitatif	a. Fasilitas Jalan, Penerangan dan Sanitasi	Peran pemerintah desa dalam penyediaan fasilitas dasar dan pembentukan Pokdarwis di Samalengoh tergolong cukup baik. Pemdes telah berupaya melalui koordinasi lintas sektor dan fasilitasi kelembagaan, namun pelaksanaan di lapangan masih terkendala anggaran dan rendahnya partisipasi pengelola, serta lambatnya tindak lanjut Pemdes.
		b. Fasilitas Pembentukan Pokdarwis	
2.	Peran Edukasi	a. Pelatihan Wisata	Pemerintah desa telah melaksanakan pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengelolaan wisata, namun partisipasi masyarakat masih rendah sehingga diperlukan pendekatan yang lebih intensif dan berkelanjutan. Cukup Baik, namun perlu peningkatan efektivitas.
		b. Pemahaman Potensi	
		c. Sosialisasi Ekowisata	
3.	Peran Representasional	a. Promosi Wisata	Promosi wisata dilakukan secara representasional melalui media sosial dan koordinasi eksternal, namun terbatasnya SDM, anggaran, dan tindak lanjut kerja sama menunjukkan perlunya penguatan peran pemerintah desa dalam membangun kemitraan strategis dan meningkatkan efektivitas promosi wisata secara berkelanjutan. Sudah baik.
		b. Hubungan Eksternal	

4.	Peran Teknis	a. Peran Kamtibnas	Pemerintah desa menjalankan peran teknis melalui pengamanan, mediasi konflik, dan pengelolaan anggaran wisata. Meski koordinasi berjalan baik, hambatan seperti keterbatasan dana dan kurangnya transparansi menuntut peningkatan akuntabilitas dan sinergi untuk menjaga stabilitas serta keberlanjutan pengelolaan wisata Samalengoh. Sudah baik.
		b. Peran Moderasi	
		c. Peran Anggaran	

Sumber : Hasil Wawancara di Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang, Maret-Juni 2025

Pemerintah Desa memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendukung pengembangan wisata lokal, khususnya di kawasan wisata Samalengoh *Camp*. Peran tersebut terlihat melalui dimensi fasilitatif, edukatif, representasional, dan teknis sebagaimana dikembangkan oleh Ife dan Tesoriero (dalam Putri dan Zulkarnaini, 2023:280-282).

Pemerintah Desa Gunturmekar telah berupaya menyediakan fasilitas dasar yang mendukung kegiatan wisata, seperti perbaikan akses jalan menuju lokasi, pembangunan sanitasi, serta pengadaan infrastruktur dasar lainnya. Meskipun penerangan masih menjadi kendala utama karena belum merata, pemerintah desa tetap menunjukkan komitmen melalui penganggaran dalam APBDes dan pengajuan ke instansi terkait. Hambatan yang muncul dalam aspek ini umumnya terkait dengan keterbatasan anggaran dan pemahaman pengelola terhadap fungsi wisata sebagai sarana edukasi dan pelestarian, bukan semata hiburan.

Selain itu, Pemdes juga memfasilitasi pembentukan dan legalisasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang berperan dalam pengelolaan wisata secara langsung. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan bahwa partisipasi pengelola belum maksimal karena orientasi yang masih bersifat material. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan visi dan pemahaman strategis mengenai pentingnya Pokdarwis sebagai ujung tombak pengelolaan wisata berbasis masyarakat.

Pemerintah Desa Gunturmekar juga menjalankan peran edukatif melalui berbagai bentuk pelatihan dan sosialisasi. Pelatihan wisata telah dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan destinasi. Walau partisipasi masyarakat belum maksimal, pendekatan berkelanjutan dan peningkatan motivasi terus dilakukan.

Pemdes juga berperan dalam membangun pemahaman masyarakat terhadap potensi lokal yang dimiliki Samalengoh *Camp*. Edukasi dilakukan melalui forum diskusi, kegiatan bersama, serta pendekatan personal untuk menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya pelestarian lingkungan dan pengembangan wisata. Sosialisasi ekowisata dilakukan sebagai bentuk edukasi berkelanjutan yang mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Upaya ini ditunjukkan melalui kegiatan seperti penanaman pohon, pembersihan lingkungan, serta penyampaian nilai-nilai konservasi alam yang relevan dengan konsep wisata alam dan edukatif.

Dalam dimensi representasional, Pemerintah Desa Gunturmekar telah melakukan berbagai upaya promosi wisata, baik secara personal melalui media sosial aparat desa maupun melalui kerja sama dengan pengelola. Meskipun keterbatasan SDM dan anggaran menjadi hambatan, peran pengelola dalam membuat konten digital turut mendukung promosi wisata secara lebih luas dan efisien. Pemdes juga menjalin hubungan eksternal dengan pihak-pihak seperti dinas pariwisata, Muspika, serta desa tetangga. Bentuk hubungan ini berfungsi untuk memperkuat kolaborasi dalam pengembangan wisata, seperti dalam hal keamanan dan kegiatan promosi lintas wilayah. Meski demikian, belum semua potensi kerja sama ditindaklanjuti secara optimal, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas representasional dalam membangun kemitraan yang lebih strategis dan berkelanjutan.

Pemerintah Desa Gunturmekar juga memainkan peran teknis dalam pelaksanaan kegiatan wisata secara langsung. Salah satu contohnya adalah pelibatan Babinsa, Polsek, Linmas, dan masyarakat setempat dalam sistem piket keamanan untuk menjaga kondusivitas kawasan wisata. Keamanan menjadi salah satu fokus utama untuk menciptakan kenyamanan bagi pengunjung. Dalam hal penyelesaian konflik, Pemdes menjalankan peran moderasi melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah. Konflik antara pengelola dan Bumdes yang terjadi ditangani melalui mediasi bertahap, sehingga stabilitas sosial di kawasan wisata tetap terjaga. Terkait pengelolaan anggaran, Pemdes menyerahkan teknis pelaksanaan kepada Bumdes dengan tetap melakukan pengawasan dan memberikan arahan kebijakan. Namun, keterbatasan anggaran dan

kurangnya transparansi menjadi hambatan yang harus segera dibenahi melalui peningkatan akuntabilitas dan koordinasi yang lebih terbuka.

Secara keseluruhan, peran Pemerintah Desa Gunturmekar dalam pengembangan wisata Samalengoh Camp telah berjalan cukup baik meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Keterlibatan pemerintah desa dalam seluruh aspek—mulai dari fasilitasi, edukasi, representasi hingga pelaksanaan teknis—menunjukkan adanya komitmen untuk membangun pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Kedepan, diperlukan strategi penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta transparansi dan keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat untuk mewujudkan Samalengoh sebagai destinasi wisata unggulan desa.

4. CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Gunturmekar memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan wisata Samalengoh Camp. Peran tersebut dijalankan melalui empat dimensi utama, yaitu fasilitatif, edukatif, representasional, dan teknis, sebagaimana dikemukakan oleh Ife dan Tesoriero. Dalam aspek fasilitatif, Pemdes berupaya menyediakan fasilitas dasar seperti akses jalan, sanitasi, dan penerangan, serta membentuk dan membina Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Meskipun keterbatasan anggaran dan rendahnya partisipasi masih menjadi hambatan, pemerintah tetap menunjukkan komitmen melalui penganggaran dalam APBDes dan koordinasi lintas sektor.

Pada dimensi edukatif, pemerintah desa telah menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan wisata serta menanamkan nilai-nilai pelestarian lingkungan melalui pendekatan ekowisata. Namun, partisipasi masyarakat masih belum optimal sehingga diperlukan pendekatan yang lebih intensif.

Dalam aspek representasional, Pemdes terlibat aktif dalam promosi wisata, baik melalui media sosial maupun kerja sama dengan instansi dan pihak eksternal. Kendala SDM dan anggaran masih membatasi efektivitas promosi, namun sinergi dengan pengelola cukup mendukung upaya pemasaran.

Peran teknis ditunjukkan melalui pelibatan dalam keamanan kawasan wisata, mediasi konflik, dan pengawasan penggunaan anggaran. Hambatan seperti minimnya transparansi dan komunikasi perlu segera diatasi melalui peningkatan akuntabilitas dan pelaporan terbuka.

Secara keseluruhan, Pemerintah Desa Gunturmekar telah baik menunjukkan peran aktif dan komitmen dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat secara berkelanjutan. Ke depan, penguatan kelembagaan, peningkatan SDM, serta transparansi dan kolaborasi multipihak sangat diperlukan untuk mewujudkan Samalengoh Camp sebagai destinasi wisata unggulan desa.

REFERENCES

- Abdullah (2015). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Adiwilaga et al. (2024) – *Strategi Pemerintah Desa Meningkatkan Perekonomian Desa Wisata Pasirmulya, Jurnal Noken*
- Alfianto (2021) – *Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata di Pakuncen, Paradigma, UNESA*
- Amirudin, A. (2018). Inovasi peran pemerintah desa dalam kebijakan pariwisata di Kota Batu. *JPSI: Journal of Public Sector Innovations*, 2(1), 26–32. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p26-32>
- Arsyad, I. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM, Yogyakarta.
- Arwanto, Setyawan dan Widiyarta. (2020). Strategi City Branding Kota Surabaya Sparkling Surabaya dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan. *Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia. Perspektif*, 9 (2) (2020): 322-328.
- Basri, F., & Munandar, H. (2010). *Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Daryanto, & Setyobudi, I. (2018). *Pemasaran Strategik: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Effendi, B. (2002). *Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan*. Yogyakarta: Uhaindo dan Offset.
- Fathoni, A., & Sofyan, R. (2016). Pemberdayaan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Wisata Alam di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Pariwisata*, 5(3), 153-167.

- Febriandhika, I., & Kurniawan, T. (2019). Membingkai konsep pariwisata yang berkelanjutan melalui *community-based tourism*: Sebuah review literatur. *JPSI: Journal of Public Sector Innovations*, 3(2), 50–56. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p50-56>
- Firdaus, M., & Rahman, A. (2019). Strategi Pengembangan Desa Wisata Samalengoh: Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 8(1), 77-91.
- Fitriyani, (2022). Peran pemerintah dalam meningkatkan ekonomi desa wisata. Tesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Gautama, et al. (2020). Pengembangan Desa Wisata melalui Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Bernas*.
- Haris, M., & Usman, A. (2018). Dinamika Pengembangan Desa Wisata Samalengoh dan Faktor-Faktor Penunjangnya. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 7(4), 102-118.
- Hesti, P. (2015). Faktor Eksternal Dan Internal Dalam Pengembangan Daya Tarik Wisata Taman Buah Kusuma Agrowisata Kabupaten Batu Malang. *Khasanah Ilmu: Jurnal Pariwisata Dan Budaya*.
- Iswanti, & Zulkarnaini. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan. *Jurnal Publika*.
- Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. (2025). *Desa Wisata Samalengohcamp*. Jejaring Desa Wisata. <https://jadesta.kemenpar.go.id/desa/samalengohcamp>
- Kuncoro, M. (2004) Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, Dan Peluang. Jakarta, Erlangga.
- Kusnadi, A. (2018). *Pembangunan Desa dan Pariwisata: Kolaborasi antara Pemerintah dan Masyarakat*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Laru, F. H. U., & Suprojo, A. (2019). Peran pemerintah desa dalam pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(4), 367-371. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/2017/1467>
- Marliani, (2023). Peran Pemerintah Dalam Manajemen Strategi Pengelolaan Desa Wisata di Daerah Kepulauan. *Jurnal Archipelago*.
- Mijang et al. (2022). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Wisata di Desa Liang Ndara. *Jurnal Edusocius*.
- Mukti, F. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Lokal. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Muluk, K. (2009). *Desentralisasi Pemerintah dan Daerah*. Malang: Bayu.
- Mulyati, & Supardal. (2023). Upaya Pemerintah Desa dalam Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Desa Wisata. *Jurnal JIM*.
- Muzakki, A. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata Desa*. Jakarta: LP3S.
- Pasolong, H. (2014). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Peter dan Olson (2005). *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran*. Jakarta: Selambe Empat.
- Prabowo, H. (2019). *Manajemen Pengembangan Desa Wisata: Teori dan Aplikasi Praktis di Indonesia*. Surabaya: Penerbit Ilmu.
- Prasetyo, D., & Widodo, B. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Gunturmekar: Studi Kasus di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Administrasi Negara*, 12(3), 155-172.
- Purnama, S., & Suryadi, H. (2020). Strategi Pemerintah Desa dalam Mengembangkan Potensi Wisata Alam di Wilayah Perdesaan: Studi Kasus di Desa Cikadu, Jawa Barat. *Jurnal Pengembangan Wilayah dan Kebijakan*, 10(4), 235-247.
- Rahman, A. & Sumarni, N. (2017). *Pengembangan Pariwisata Desa di Indonesia: Pendekatan Berbasis Komunitas*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

- Rahmat, M. I. R. (2020). Kolaborasi *quadruple helix* dalam menciptakan inovasi konsep wisata edukasi Kampung Nanas di Desa Palaan. *JPSI: Journal of Public Sector Innovations*, 4(2), 68–74. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n2.p68-74>
- Sastrawan, A. S. (2016). *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa-Desa Wisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Serdamayanti. (2014). *Ilmu Administrasi Negara*. Administrasi Negara, 134
- Setiawan, (2023). Analisis Peran Pemerintah Desa Pulau Baguk melalui BUMDes. Tesis UIN Ar Raniry.
- Setiawan, E. (2018). Budaya Organisasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 2(1), 9. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v2i1.20099>
- Sintiya, W. (2021). Peran Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Pengembangan Potensi Objek Wisata Gunung Gelung di Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang. *Repository FISIP UNSAP*, 21(1). <https://repository.unsap.ac.id/index.php/fisipunsap/article/view/119/127>
- Sopyan et al. (2023). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Pasir Bentang. *Jurnal Mutiara*.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujai, M. (2016). Kajian Ekonomi dan Keuangan. Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menarik Kunjungan Turis Mancanegara. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol 20, No. 1.
- Sukarno, D. (2013). *Pengantar Ilmu Administrasi*. Bandung: LP3AN.
- Sutrisno, E. (2018). *Pembangunan Desa dan Kemandirian Masyarakat: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Syaifudin, M. Y., & Ma'ruf, M. F. (2022). Peran pemerintah Desa dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui Desa wisata (studi Di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo). *Publika*, 365-380. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/44661>
- Taufik, M., & Fauzan, M. (2021). Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Desa Gunturmekar dan Tantangan yang Dihadapi. *Jurnal Kebijakan dan Perencanaan Pariwisata*, 8(2), 97-112.
- Todoaro (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Wahidah, I., Eryanti, D., & Haikal, M. A. (2025). Revitalisasi Kelembagaan BUMDes Melalui Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Penguatan Ekonomi di Desa Gunturmekar Kabupaten Sumedang: Institutional Revitalization of Village-Owned Enterprises Through Community Empowerment in Efforts to Strengthen the Economy in Gunturmekar Village, Sumedang Regency. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 10(4), 1009-1011.
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*.
- Widiatmaka, D. (2015). *Ekonomi Pariwisata Desa: Potensi dan Tantangannya di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Wulandari, I., & Sari, M. M. K. (2022). Mekanisme partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Desa Wisata Setigi di Desa Sekapuk Kabupaten Gresik. *Journal of Civics and Moral Studies*, 7(1), 16–29. <https://doi.org/10.26740/jcms.v7n1.p16-29>
- Yuniar, F., & Susilo, B. (2019). Evaluasi Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Wisata Berkelanjutan di Desa Wisata Samalengoh, Sumedang. *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pariwisata*, 6(2), 55-68.
- Zulkarnaini, & Iswanti. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan. *Jurnal Publika*.